

Pengaruh Pelatihan Dan Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen)

Denny Firmansyah, Muhammad Zia Ulhaq, Muhammad Diah

Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Almuslim
denny.firmansyah@umuslim.ac.id, mudi.unimus@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja (Studi kasus pada badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten bireuen). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKD kabupaten Bireuen dan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 72 orang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian, pengujian hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Pelatihan (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,406. Sedangkan t-tabel sebesar 1,669. Hal ini menunjukkan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Kejelasan tujuan anggaran (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,128 sedangkan t-tabel sebesar 1,669. Hal ini menunjukkan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Sehingga secara parsial variabel pelatihan dan kejelasan tujuan anggaran masing-masing berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Selanjutnya berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan (Uji f), menunjukkan bahwa F-hitung sebesar 11,562 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001, sedangkan nilai F tabel sebesar 3,12 yang menunjukkan $F\text{ hitung} > F\text{ tabel}$ ($11,562 > 3,12$). Hal ini mengkonfirmasi penolakan H_0 dan menerima H_a yang bermakna bahwa secara bersama-sama variabel pelatihan dan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Kata Kunci: Pelatihan, Kejelasan Tujuan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja pemerintah merujuk pada tanggung jawab pemerintah dalam menggunakan anggaran publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya negara. Salah satu faktor yang berperan besar dalam akuntabilitas kinerja adalah pelatihan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, yang dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam merencanakan serta melaksanakan program. Selain itu, kejelasan tujuan anggaran sangat penting karena tanpa arahan yang jelas, pengelolaan anggaran akan cenderung tidak terarah dan berisiko menurunkan kualitas kinerja pemerintahan.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan transparan, dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat terserap sesuai dengan hasil yang dicapai. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, indikator pelaksanaan anggaran yaitu: (1) Spesifik (specific), (2) Dapat terukur (measurable), (3) Dapat dicapai (attainable), (4) Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable), (5) Dapat ditelusuri secara jelas sumber datanya (Gani, 2020).

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada akuntabilitas kinerja Pegawai Negeri Sipil di BPKD Kabupaten Bireuen dalam menyusun anggaran sesuai dengan sasaran anggaran yang ingin dicapai. Pegawai memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan yang tepat. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparat pemerintah untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target anggaran yang disusun akan disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah. Dengan adanya sasaran yang jelas diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Muhammad Karyadi, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bireuen, dengan fokus pada dua aspek utama: (1) bagaimana pelatihan yang diberikan kepada pegawai pemerintah dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang kebijakan anggaran dan (2) bagaimana kejelasan tujuan anggaran mempengaruhi kemampuan untuk mengukur kinerja dan pencapaian hasil. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pelatihan dan Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen).”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data-data primer lalu melakukan uji hipotesis untuk mengetahui hubungan antar variabel. Adapun penelitian ini dilakukan pada badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten bireuen. Berdasarkan pendapat para ahli seperti Arikunto (2006) Winarno .S (2003) dan kartini,K (2008), ukuran sampel dapat ditentukan oleh ukuran populasi. Oleh karena itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 orang aparatur sipil negara.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, analisis yang dilakukan dengan cara mengkuantitatifkan data-data penelitian kedalam bentuk angka-angka dengan rasio skala *likert* 5 poin. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda karna terdapat dua variabel pengaruh.

Data responden menunjukkan bahwa jumlah responden terbanyak ada pada usia 41-50 yaitu sebanyak 27 responden atau 37,5% dari keseluruhan jumlah responden. Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam penelitian ini di dominasi oleh kaum wanita yaitu sebanyak 70,8% atau 51 responden. Sedangkan dari tingkat pendidikan, pemegang ijazah srtata satu menjadi kontributor dominan yaitu sebanyak 72,5% dari total sampel. Sementara tingkat partisipasi responden mencapai 73,63%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji statistik

Dari data yang terhimpun kemudian dilakukan pengujian dengan melakukan uji regresi linier berganda mengingat variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua.hasil uji statistik yang dilakukan dapat terlihat seperti pada tabel berikut:

Uji regresi linear berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	7,037	2,891		2,434	<,001
	Pelatihan_X1	,343	,101	,375	3,406	,004
	Kejelasan Tujuan, Anggaran_X2	,278	,131	,234	2,128	,001

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: $Y = 7,037 + 0,343 X_1 + 0,278 X_2 + e$. Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 7,037 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara vaeriablel bebas (pelatihan kerja dan kejelasan tujuan anggaran) dengan variabel terikat akuntabilitas kinerja. Artinya apabila variabel bebas ditingkatkan maka akan

- diikuti oleh peningkatan variabel terikat.
2. Koefisien pelatihan (X 1) sebesar 0,343 (positif), artinya jika nilai Pelatihan meningkat 1 satuan, maka nilai Akuntabilitas Kinerja meningkat sebesar 0,343. Sebaliknya jika nilai Pelatihan turun 1 satuan, maka nilai Akuntabilitas Kinerja turun sebesar 0,343.
 3. Koefisien kejelasan tujuan anggaran (X2) sebesar 0,278 (positif) berarti bahwa jika nilai Kejelasan Tujuan Anggaran meningkat 1 satuan, maka nilai Akuntabilitas kinerja meningkat sebesar 0,278. Sebaliknya jika nilai Kejelasan Tujuan Anggaran turun 1 satuan, maka nilai Akuntabilitas Kinerja akan turun sebesar 0,278.

Uji parsial (uji T)

Coefficients^a

odel		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	7,037	2,891		2,434	<,001
	Pelatihan_X1	,343	,101	,375	3,406	,004
	Kejelasan Tujuan Anggaran_X2	,278	,131	,234	2,128	,001

1. Pada variabel pelatihan (X1) di peroleh t-hitung sebesar 3,406 dengan tingkat signifikan sebesar 0,004 dan t-tabel sebesar 1,669. Dengan demikian t-hitung > t-tabel , maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa adanya pengaruh positif antara pelatihan terhadap akuntabilitas kinerja.
2. Pada variabel kejelasan tujuan anggaran (X2) di peroleh t-hitung sebesar 2,128 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 dan t-tabel sebesar 1,669. Dengan demikian t-hitung > t-tabel. Hal ini mengkonfirmasi ponolakan H0 dan menerima Ha yang berarti bahwa adanya pengaruh positif antara kejelasan tujuan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79,903	2	39,951	11,562	<,001 ^a
	Residual	238,417	69	3,455		
	Total	318,319	71			

- a. Predictors: (Constant), Pelatihan, Kejelasan anggaran,
- b. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja

Tabel diatas menunjukkan hasil uji F dangan nilai F hitung sebesar 11,562 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Sedangkan nilai F tabel memiliki tingkat signifikansi 5% (0,001< 0,05). Dengan nilai df = 2 ,maka dengan menggunakan rumus dapat dihitung yaitu df = n-k-1 (72-2-1= 69) sehingga nilai F tabel diperoleh sebesar 3,12. Dengan demikian F hitung > F tabel artinya secara simultan pelatihan dan kejelasan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,501 ^a	,251	,229	1,859

Hasil tabel diatas, koefisien korelasi (R) sebesar 0,501 atau sebesar 50,1%. Berarti bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pelatihan dan kejelasan tujuan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja, adapun koefisien determinasi (Adjusted R) sebesar 0,251, atau sebesar 25.1% yang berarti bahwa, pelatihan dan kejelasan tujuan aqnggaran memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 25,1% sedangkan sisanya 75% dipengaruhi oleh varibel lain diluar model penelitian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelatihan dan Kejelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkanj hasil uji statistik dengan analisis korelasi didapatkan koefisien korelasi (R) 0,501, yang berarti bahwa korelasi pelatihan dan kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kineja mencapai 50,1%. Selanjutnya nilai koefisien determinasi 0,251 menunjukkan adanya kontribusi pelatihan dan kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kineja sebesar 25,1%.
 Hasil ini mempertegas bahwa pelatihan yang diberikan kepada pegawai pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pengelolaan anggaran. Dengan adanya pelatihan, pegawai pemerintah lebih mampu memahami prosedur dan regulasi terkait anggaran, sehingga mereka dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan akuntabel. Sebagai contoh, pelatihan dalam bidang akuntansi publik dan manajemen anggaran memungkinkan pegawai untuk menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pada pendekatan analisa regresi linear berganda, diperoleh model regresi : $Y = 7,037 + 0,343 X_1 + 0,278 X_2 + e$. Hal ini mengkonfirmasi bahwa 1. jika pelatihan ditingkatkan sebesar 1%, maka akuntabilitas kinerja akan meningkat 3,43%. 2. Jika kejelasan anggaran ditingkatkan 1%, maka akuntabilitas kinerja akan meningkat sebesar 2,78%. 3. Pengaruh pelatihan pada BPKD lebih dominan dari pada pengaruh kejelasan anggaran. Meskipun demikian, anggaran yang jelas memberikan landasan bagi pegawai pemerintah untuk melakukan fungsi pengelolaan yang lebih terarah dan terukur. Kejelasan ini memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas kebijakan dan bahwa kinerja dapat diukur berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2020) mengindikasikan bahwa adanya tujuan yang jelas dalam perencanaan anggaran memperkuat akuntabilitas, karena memberikan dasar yang lebih kuat untuk evaluasi hasil dan pengelolaan anggaran.
3. Untuk menjawab hipotesis, maka dilakukan uji –t terhadap masing-masing vareibel. Untuk variabel kualitas pelayanan (X1), diperoleh t-hitung sebesar 3,406 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 dan t-tabel sebesar 1,669. Dengan demikian t-hitung > t-tabel, artinya pelatihan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap

akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis satu (H1) diterima. Untuk variabel kejelasan tujuan anggaran (X2) diperoleh t-hitung sebesar 2,128 dengan tingkat signifikansi 0,001. Sedangkan t-tabel diketahui sebesar 1,669. Dengan demikian, t-hitung > t-tabel, yang artinya kejelasan tujuan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, hipotesis dua (H2) diterima. Sedangkan untuk menguji dua variabel bebas sekaligus terhadap variabel terikat, yaitu pelatihan dan kejelasan tujuan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja, dilakukan dengan uji F. Pada hasil uji F diperoleh nilai f-hitung sebesar 11,562, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Sedangkan nilai f-tabel dengan tingkat signifikansi 5% dan $df = n-k-1$ ($72-2-1=69$) di peroleh nilai f-tabel 3,12. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya pelatihan dan kejelasan tujuan anggaran secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikansi terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan hipotesis Tiga (H3) diterima.

Dari hasil ini dapat terlihat bahwa pelatihan dan kejelasan tujuan anggaran tidak hanya berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pelatihan memberikan pegawai kemampuan untuk mengimplementasikan tujuan anggaran dengan cara yang lebih efektif, sementara tujuan anggaran yang jelas memberikan fokus yang diperlukan dalam setiap langkah pengelolaan anggaran. Kedua faktor ini saling berinteraksi untuk menciptakan sistem akuntabilitas yang lebih kuat, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

4. Pelatihan dan kejelasan tujuan anggaran berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pelatihan meningkatkan kemampuan pegawai pemerintah dalam mengelola anggaran dan kebijakan publik dengan lebih efektif, sementara kejelasan tujuan anggaran memberikan arahan yang jelas dalam penggunaan sumber daya negara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap kedua faktor ini, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan publik.

Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pimpinan BPKD Bireuen perlu meningkatkan kualitas pelatihan bagi pegawainya, khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran dan pemantauan kinerja.
2. Kepada seluruh pegawai di lingkup BPKD Bireuen terutama kepada pimpinana yang berteanggungjawab penuh atas pengelolaan anggaran harus dapat merumuskan tujuan anggaran yang lebih jelas dan terukur agar pengelolaan anggaran lebih transparan dan akuntabel.
3. Penelitian ini terbatas pada dua variabel yaitu pelatihan dan kejelasan tujuan anggaran dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja. Sementara masih banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi akuntabilitas seperti gaya kepemimpinan, komunikasi, kesehatan dan lain sebagainya, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor lain tersebut untuk diteliti pada penelitian yang kan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, M., & Sudana, I. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, *11*(2), 611–628.
- Anggaran, P., Kinerja, B., & Kejelasan, D. A. N. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(1), 47–56. <https://doi.org/10.35968/Jbau.V6i1.625>

- Denny Firmansyah & Tri Harnida Dewi (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 (6), 1107-1116. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i6209>.
- Elsa Pinika Putri Purba, & Kusmilawaty Kusmilawaty. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. *Akuntansi*, 3(1), 304–319. <https://doi.org/10.55606/Akuntansi.V3i1.1490>
- Khan, M., et al. 2020. The Effectiveness of Training in Public Administration. *Journal of Public Sector Management*, 42(3), 225-240.
- Oszlak, O. 2021. Budget Transparency and Performance: A Global Perspective. *Public Finance Review*, 49(6), 834-852
- Rahman, M., et al. 2022. Public Sector Accountability and Performance Evaluation. *Public Administration Review*, 64(4), 555-570
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sutrisno, A. 2020. Anggaran yang Jelas: Kunci untuk Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Administrasi Negara*, 56(1), 45-59.
- Yulianto Ahmad Rudi, & Osmad, M. 2019. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 14(2), 204–219.